

**PENGARUH STRUKTUR PENGENDALIAN INTERN TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI DESA
PETUNGSEWU KECAMATAN DAU KABUPATEN MALANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Ekonomi



Oleh:

Risti Yanti Jera Atajawa

Nim:2018110063

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADDEWI
MALANG**

2022

**PENGARUH STRUKTUR PENGENDALIAN INTERN TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI DESA
PETUNGSEWU KECAMATAN DAU KABUPATEN MALANG**

Risti Yanti Jera Atajawa¹, Poppy Indri Hastuti², Ahmad Mukoffi³

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Tribhuwana Tungadewi
Malang 2022

Email: ristiyantijera.atajawa@gmail.com

ABSTRAK

Struktur pengendalian intern diharapkan dapat mengatur dan mengontrol efektifitas pemungutan pajak sehingga mampu meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan dalam pembayaran pajak. Motivasi yang melatarbelakangi penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pengendalian interior terhadap konsistensi Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Petungsewu Kecamatan Dau Kabupaten Malang. Eksplorasi ini merupakan penelitian yang menggunakan strategi kuantitatif. Kepastian contoh penelitian ini menggunakan teknik dasar pemeriksaan tidak beraturan dengan tujuan agar pemeriksaan menguji ke atas 92 responden. Prosedur pengumpulan informasi yang digunakan oleh ilmuwan adalah survei. Strategi penelusuran informasi yang digunakan adalah kekambuhan langsung langsung dengan menggunakan program SPSS. Hasil kajian menunjukkan bahwa inside control secara fundamental mempengaruhi konsistensi Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Petungsewu Kecamatan Dau Kabupaten Malang dengan thitung = 4,093 atau berdampak sebesar 63,2%. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Petungsewu, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang harus membayar beban dengan hormat untuk meningkatkan pendapatan bea negara.

Kata Kunci: Kepatuhan, Pajak Bumi Dan Bangunan, Struktur Pengendalian Intern, Wajib Pajak

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Pelaksanaan pengendalian orang dalam (iklim pengendalian, penilaian risiko, tindakan, data dan korespondensi, dan pengendalian) sangat mempengaruhi pengendalian dan ketepatan informasi pembukuan atau laporan akuntansi dan moneter yang disampaikan oleh tokoh terakhir secara akurat.

Fokus utama dari pendekatan peningkatan pendapatan moneter negara di Indonesia antara lain menyelidiki, memberdayakan, dan menciptakan sumber-sumber pendapatan dari dalam negeri, untuk meningkatkannya sesuai dengan persyaratan kemajuan dan administrasi. Dengan tujuan akhir untuk meningkatkan pendapatan moneter negara, ada hubungan positif dengan kebutuhan untuk membangun batas daerah penting, termasuk memperluas kapasitas pendapatan dari daerah pengeluaran. Dengan demikian, dengan tujuan akhir untuk meningkatkan pendapatan, khususnya melalui berbagai program eskalasi, daerah tugas merupakan salah satu sumber pendapatan pendukung yang sangat berguna dalam pemberdayaan pemerintah, peningkatan dan pemberdayaan pembangunan keuangan. Strategi otoritas publik dalam memperluas pendapatan dalam negeri dari area pengeluaran antara lain melalui perubahan kerangka evaluasi otoritas menjadi penilaian otonom.

Dalam kerangka penilaian diri, warga diharapkan untuk memastikan, membayar, dan melaporkan sendiri berapa kewajiban yang harus dibayar sesuai pengaturan peraturan dan pedoman pengeluaran. Upaya untuk melibatkan daerah melalui pelaksanaan kerangka evaluasi diri, memerlukan perubahan sosial dan kerangka nilai, baik untuk warga negara dan selanjutnya harus diikuti oleh kegiatan administrasi untuk mengakui target strategi biaya. Dengan demikian, analisis biaya dalam melakukan kewajiban administrasi harus didukung oleh berbagai elemen pendukung, salah satunya adalah menetapkan tahapan kunci untuk lebih mengembangkan konsistensi warga. Badan publik juga memahami bahwa kerangka tugas sangat diperlukan dan harus dibarengi dengan upaya untuk lebih mengembangkan kontrak pemungutan pajak, baik dari segi teknik, sistem kerja, disiplin kerja, maupun disposisi psikologis pejabat, serta sebagai administrasi yang ideal.

Dalam pelaksanaan tugas bermacam-macam, ini merupakan bentuk komitmen, komitmen, dan dukungan warga negara untuk secara lugas dan menyelesaikan komitmen pengeluaran yang diperlukan untuk pendanaan negara dalam pelaksanaan pergantian acara publik.

Rancangan yang ditunjukkan oleh tiga hal, yaitu iklim pengendalian, kerangka pembukuan, dan pengendalian yang memuaskan dalam suatu administrasi akan membantu pengendalian sumber daya baik fisik maupun non-aktual dari kesalahan penyajian.

Pengendalian batin diperlukan untuk mengarahkan kegiatan asosiasi untuk mendapatkan penegasan bahwa rencana yang telah ditetapkan dapat berjalan dengan benar. Pengujian pengendalian internal menggunakan 5 komponen yang terdiri dari iklim pengendalian, penilaian risiko, latihan pengendalian, data dan korespondensi, dan pengamatan. iklim kontrol adalah premis, semuanya sama, iklim kontrol di mana dewan dan eksekutif saling melaksanakan dan mendukung satu sama lain dalam menunjukkan asosiasi untuk mengatur, melaksanakan dan mengendalikan untuk mencapai tujuan hierarkis. Evaluasi risiko dilakukan sebentar-sebentar dan para eksekutif harus melakukan survei berdasarkan kebutuhan.

Latihan kontrol sangat penting untuk eksekusi yang kuat, perincian dan tanggung jawab aset dan pengaturan hasil. Struktur kontrol internal juga ditampilkan untuk mencegah duplikasi pekerjaan yang tidak perlu dan mencegah penggunaan aset organisasi yang tidak, serta memberikan dukungan kepada pendukung keuangan sehingga pendekatan dewan dapat disetujui oleh perwakilan. Apalagi dengan kondisi yang sesungguhnya bahwa siklus penanganan informasi pembukuan akan menghasilkan data moneter yang tepat dan solid.

Dalam pemanfaatan bermacam-macam tugas, itu adalah bentuk pengabdian, komitmen, dan dukungan warga negara untuk secara lugas dan melakukan beban komitmen yang diperlukan untuk pendanaan negara dalam pelaksanaan urusan publik. Komitmen pungutan terhadap pungutan sebagai kesan kewajiban perhatian adalah pada pengeluaran warga sendiri, untuk mengarahkan tugas dan tarif teritorial, penting untuk

terus berkembang sebanyak mungkin melalui pendapatan kabupaten terkait dan terdiri dari tugas provinsi, tugas lokal, konsekuensi kekayaan daerah para pelaksana yang mengasingkan dan pendapatan asli daerah lainnya (UU RI No. 25 Tahun 1999). Hal ini tergantung pada strategi kemandirian wilayah dimana setiap daerah dapat bebas untuk kebutuhannya sendiri, dengan tujuan agar setiap daerah memiliki pilihan untuk memperluas konsekuensi Pendapatan Asli Daerah (PAD)..

Konsistensi warga negara dapat dipengaruhi oleh beberapa variabel, seperti keadaan khusus, kerangka peraturan suatu negara, sifat administrasi untuk warga negara, pemolisian biaya, tarif retribusi (Rahayu 2011). Kerangka kerja yang meningkat sangat penting karena dengan meningkatnya kerumitan kerangka kerja biaya akan memberikan kekuatan dan penilaian berkurang sehingga mempengaruhi pemberontakan warga. (Fitzgerald 2016) Sebelumnya, disebutkan bahwa kerangka tugas penting untuk ditingkatkan mengingat hal itu mempengaruhi konsistensi warga itu sendiri dan dari konsistensi warga ada juga pemenuhan warga yang menganggap bahwa bantuan yang didapat atau dilihat sesuai dengan asumsi. , sifat pemberian tampak besar dan dapat diterima, dengan asumsi bantuan yang didapat asumsi klien adalah sifat bantuan yang dipandang sebagai kualitas yang ideal, dalam hal apapun menganggap bahwa bantuan yang didapat lebih rendah dari yang diharapkan, kualitas bantuan adalah dianggap buruk, oleh karena itu koperasi spesialis harus dapat menawarkan jenis bantuan yang enak bahkan untuk menjadi hebat. dapat memberikan loyalitas konsumen.

Pendapatan muatan adalah sumber aset untuk lebih mengembangkan kemajuan dan berkembang bersama di mata publik, termasuk membuka pintu bagi individu yang tertindas untuk bekerja sesuai cara hidup mereka. Dari penggunaan ini, sangat jelas terlihat bahwa biaya mengandung komponen nilai dan ekuitas. Retribusi tanah dan bangunan merupakan salah satu pendapatan provinsi yang mungkin dapat dibayarkan oleh daerah dan digunakan untuk mendukung kemajuan. Tugas daerah dalam menjalankan roda pemerintahan sangat vital. Dengan lemahnya tingkat konsistensi daerah, maka penting untuk diberikan pembinaan yang bukan hanya merupakan komitmen setiap warga, melainkan merupakan hak setiap daerah untuk ikut serta dalam pembiayaan negara melalui perbaikan. Untuk memiliki pilihan untuk menyelesaikan pergantian acara dan organisasi negara, diperlukan kolaborasi antara daerah dan otoritas publik.

Berdasarkan persepsi dan persepsi di lapangan dan informasi di Desa Petungsewu, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, maka terdapat permasalahan antara lain:

1. Penyajian pengumpul masih rendah dalam menagih pungutan dari individu yang tidak tepat waktu dalam penyelesaian pungutan.
2. Belum adanya koordinasi yang baik antara pengumpul retribusi dengan masyarakat setempat, hal ini terlihat dari alasan individu mengatakan belum mendapatkan sosialisasi dan hampir tidak mengenal batas waktu penyelesaian retribusi sehingga lesu untuk membayar.

3. Tidak ada ijab kabul yang berat bagi warga yang terlambat menyelesaikan pungutan, hanya teguran dari pihak pengumpul tugas agar tidak berdampak halangan bagi daerah itu sendiri.

Dalam ulasan ini, konsistensi warga di Desa Petungsewu, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang digali. Konsekuensi dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kontrol kontrol memiliki hubungan kritis dengan konsistensi dengan konsistensi dengan komitmen pengeluaran pribadi. Berdasarkan pengalaman di atas, para spesialis yang tertarik untuk memimpin studi eksplorasi adalah: **“PENGARUH STRUKTUR PENGENDALIAN INTERN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI DESA PETUNGSEWU, KECAMATAN DAU, KABUPATEN MALANG”**

1.2 Rumusan Masalah

Dilihat dari latar belakang masalah tersebut, maka definisi masalah dalam penelitian ini adalah:

Bagaimana pengaruh konstruksi interior terhadap konsistensi warga tanah dan bangunan di Desa Petungsewu, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dampak inward design terhadap konsistensi warga dilihat dari gadget dalam mengembangkan lebih lanjut konsistensi warga membayar retribusi di Desa Petungsewu, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang..

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Eksplorasi ini diharapkan dapat memberikan garis besar dan komitmen pemikiran untuk wilayah lokal yang lebih luas dan sebagai bahan referensi dan kontribusi bagi pihak-pihak yang akan mengarahkan pemeriksaan lebih lanjut karena struktur dalam pada konsistensi warga dan dapat menambah sumber perpustakaan yang ada..

2. Manfaat Praktis

a. Siswa

Eksplorasi ini diterapkan untuk menambah informasi bermanfaat yang dapat diterapkan di tengah-tengah masyarakat

b. Program Studi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan untuk menambah referensi di perpustakaan Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang dan menambah informasi khususnya yang berkaitan dengan konsistensi warga.

c. Pemerintah

Sebagai informasi dan data yang dapat dilihat oleh negara-negara terdekat dalam membuat strategi moneter.

DAFTAR PUSTAKA

- Damayanti, L. Dwi,& Amah, N. (2018). *Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Dan Pengumpulan Pajak. Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan, 7 (1), 57-71.*
- Dewi, L, P, S, K., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2018). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak. Sanksi Perpajakan. E-Filling, Dan Tax Amnesty, Universitas Udayana, 22, 1626-1655. Issn: 2302-8556*
- Hana Oktaviani. 2016. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Penghasilan.*
- Heryanto, M., & Toly, A. A. (2013). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Di Kpp Pratama Surabaya Sawahan. Tax & Accounting Review. 1(1), 124-135*
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016.* Yogyakarta: Andi.
- Martini, Rita. *Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Atas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa Di Kecamatan Sembawa. Jurnal Akademi Akuntansi. Vol. 2 No. 1 2019.*
- Rahayu. Siti Kurnia. 2010 . *Perpajakan Indonesia Konsep Dan Aspek Formal.* Yogyakarta : Graha Ilmu.

Saleba, S. N. (2014). *Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Dan Kopetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah*. Universitas Hasanuddin.

Waluyo, 2013. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat.